



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARDI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 680434

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.403.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/150 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, WARISAN Rp. 651.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6376 m2/8315 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 752.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	271.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 2DP RA AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA BJM/AT SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	46.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	269.664.150
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.989.664.150
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.989.664.150

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.